

PENGEMBANGAN KURIKULUM EKONOMI ISLAM DI PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA

Setiawan bin Lahuri

binlahuri@gmail.com

Abstrak

Sudah lebih seperempat abad perjalanan pembumian ekonomi Islam di tanah air Indonesia. Selama itu pula berbagai pakar dan ahli yang memiliki konsentrasi tentang ilmu ekonomi syariah berupaya menyusun merakit dan mengembangkan kurikulum formal yang bisa dijadikan panduan dalam pengajaran disiplin ini di lembaga-lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi. Tumbuh pesatnya industri perbankan syariah menuntut tersedianya sumberdaya manusia yang mampu memahami prinsip dasar iqtishad Islami dan handal dalam menjalankan sistem dan pengelolaan lembaga keuangan syariah sehingga dapat berkompetisi dengan perbankan lainnya. Untuk itu menjadi kewajiban bagi pengajar, dosen, dan guru besar yang sejak awal sudah menitikberatkan pada kajian ekonomi syariah untuk senantiasa mengembangkan bentuk kurikulum yang ideal dan sesuai dengan perkembangan zaman yang serba cepat. Dengan demikian para alumnus ekonomi syariah yang handal dan piawai dapat dilahirkan dan siap menjadi praktisi perbankan syariah yang tangguh menghadapi segala tantangan kehidupan termasuk di dalamnya tentang arus globalisasi.

Kata kunci : Kurikulum, ekonomi islam, perguruan tinggi

Pendahuluan

Sebagai sistem ekonomi yang dilandaskan pada al-Qur'an dan Hadits, ekonomi Islam menjamin sisi akuntabilitasnya, sepanjang para penyelenggaranya senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam secara kafah dan menjunjung tinggi kejujuran, amanah dan transparansi, serta dikelola secara profesional.

Jika disimak perjalanan Rasulullah di dalam membangun perekonomian di Madinah, maka ada tiga hal mendasar yang harus mendapat perhatian kita dalam rangka membangun perekonomian yang lebih baik. Ketiga hal tersebut

adalah landasan filosofis, prinsip operasional, dan tujuan yang ingin dicapai dari sebuah sistem ekonomi.

Secara filosofis, sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang dibangun di atas nilai-nilai Islam, di mana prinsip Tauhid yang mengedepankan nilai-nilai Ilahiyyah menjadi inti dari sistem ini. Ekonomi bukanlah sebuah entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebuah bagian kecil dari dimensi ibadah kepada Allah swt.¹

Rasulullah telah berhasil menanamkan ajaran di benak para sahabat bahwa kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah ibadah. Ada aturan-aturan yang harus ditaati, harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh asal-asalan. Wajar jika kemudian para pedagang Muslim mampu menyebar ke seluruh penjuru dunia untuk berdagang sekaligus berdakwah. Pantas pula jika Adam Smith menganggap bahwa contoh terbaik masyarakat berperadaban tinggi, yang kuat secara ekonomi dan politik adalah masyarakat Madinah di bawah pimpinan nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, mengadopsi nilai-nilai moralitas Islam dalam sistem ekonomi kita merupakan syarat mutlak untuk membangun sistem ekonomi yang lebih kuat dan berkah.²

Keberadaan ekonomi Islam memberikan pengaruh dan faedah yang besar bagi umat Islam, di antaranya, *Pertama*, mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah, sehingga Islamnya tidak lagi parsial. *Kedua*, menerapkan ekonomi Islam melalui bank, asuransi, reksadana, leasing, anjak piutang, pegadaian, atau bisnis lainnya yang Islami, akan memperoleh keuntungan duniawi dan ukhrawi. *Ketiga*, praktik ekonomi berdasarkan Islam bernali ibadah karena telah mengamalkan ajaran Allah swt. *Keempat*, mengamalkan ekonomi Islam berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam sendiri. *Kelima*, mengamalkan ekonomi Islam dengan membuka tabungan, deposito, atau menjadi nasabah asuransi Islam, berarti mendukung upaya

1 P3EI UII dan BI, *Ekonomi Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.

2 Prof. Dr. Veithzal Rivali, MBA, *Kerangka Pengembangan Kurikulum Ekonomi Islam dan Keuangan Islam di Indonesia*, paper disampaikan dalam Workshop Nasional "Arsitektur Ilmu Ekonomi Islam", di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 28 Februari 2012.

pemberdayaan ekonomi umat Islam. *Keenam*, mengamalkan ekonomi Islam berarti mendukung gerakan amar ma'ruf nahi munkar, sebab dana yang terkumpul hanya boleh dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang halal.

Realitas Kajian Ekonomi Islam di Indonesia

Kegiatan pemikiran ekonomi di dunia Islam setidaknya mengambil dua pola.³ *Pertama*, pola ideal, yakni membangun sistem ekonomi Islam yang lebih komprehensif dan holistik sebagai agenda jangka panjang dan hal yang diupayakan secara terus-menerus. *Kedua*, pola pragmatis, yakni mengembangkan sistem yang bersifat parsial dan satu aspek saja, dalam hal ini aspek lembaga keuangan syariah.

Di Indonesia, realitas menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran ekonomi Islam dimulai melalui pola kedua sehingga tidak heran jika pengembangan industri keuangan syariah tumbuh lebih cepat daripada pengkajian teoritis dan koseptual dalam pembentukan sistem yang lebih komprehensif. Wajar pula jika keterbatasan sumber daya insani yang memahami secara baik aspek ekonomi dan syariah menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam rangka pengembangan ekonomi Islam.⁴

Namun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan lembaga keuangan syariah itu sendiri merupakan pintu masuk bagi para pemikir muslim Indonesia untuk lebih mendalami ekonomi Islam dalam kerangka ilmu dan sistem.

Konsep perbankan dan keuangan Islam yang pada mulanya hanya merupakan diskusi teoritis, kini telah menjadi realitas faktual yang tumbuh dan berkembang. Bahkan saat ini industri perbankan syariah telah bertransformasi dari hanya sekedar bank alternatif dengan sistem syariah menjadi bank yang mampu memainkan peranannya dalam percaturan ekonomi dunia. Perbankan dan institusi keuangan syariah terus mengalami perkembangan yang signifikan.

3 Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sistem Ekonomi*, Jakarta: LSAF, 2006.

4 Dr. Euis Amalia, M. Ag, dkk, *Potret Pendidikan Ekonomi Islam di Indonesia, Analisis Kurikulum, Model Pembelajaran, Dan Hubungannya dengan Kompetensi SDM pada Industri Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta, Gramata Publishing, 2012.

Menurut laporan tahunan *Islamic Development Bank* (IDB),⁵ diperkirakan industri ini tumbuh lebih dari 15 persen per tahun, dengan jumlah institusi keuangan syariah lebih dari 300, tersebar di 75 negara lebih, dengan perkiraan total aset 500 miliar dollar, atau sekitar Rp. 4.600 triliun. Dengan kata lain, pasar yang sekarang sudah dicapai baru sekitar 10 persen. Ini berarti industri perbankan syariah masih menjanjikan perkembangan yang luar biasa di masa depan.

Meskipun *share* aset perbankan syariah baru sekitar 3,68 persen (per Oktober 2009) atau masih terlalu kecil dibandingkan aset perbankan nasional, tetapi peran bank syariah dalam memperkuat pembiayaan usaha menengah, kecil dan mikro cukup signifikan. Demikian juga kuatnya dukungan pemerintah dengan lahirnya undang-undang yang mandiri yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah no. 21 tahun 2008, semakin menunjukkan eksistensi bank syariah. Dukungan dari pemerintah ini mengisyaratkan adanya pengakuan bahwa industri ini diperhitungkan dalam pembangunan "ekonomi nasional".

Perbankan syariah berkembang cukup pesat, namun demikian masih dihadapkan pada berbagai tantangan, di antaranya:⁶ *Pertama, customers*, yakni perubahan konsumen dari *"religion oriented"* ke *"return oriented"* dengan ekspektasi yang sama dengan nasabah konvensional. *Kedua*, cakupan wilayah/*network* dan teknologi informasi masih terbatas. *Ketiga*, kesulitan memperoleh debitur yang baik. *Keempat*, risiko usaha sektor riil masih tinggi, kesulitan mencari debitur yang bankable. *Kelima*, persaingan *pricing* yang semakin tajam (tidak hanya antar bank syariah, tetapi juga bank konvensional dan potensi langsung masuk pasar modal). *Keenam*, keterbatasan Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan adanya kebijakan Arsitektur Perbankan Indonesia sehingga bank syariah harus memperkuat modalnya. *Ketujuh*, keterbatasan kompetensi sumber daya insani (*man power*).

Khusus untuk masalah sumber daya insani, berdasarkan riset yang

5 Tim IDB, *Annual Report IDB 2009*, Jeddah: IDB, 2009.

6 Yuslam Fauzi, "Perkembangan, Peluang, dan Tantangan Perbankan Syariah di Indonesia" dalam seminar Ada apa dengan RUU Perbankan Syariah, Jakarta, LPEB-PKB, 19 November 2005.

dilakukan oleh Universitas Indonesia tahun 2003 diungkapkan bahwa lebih dari 90 persen SDM bank syariah saat ini tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah. Di samping itu berdasarkan penyampaian *Outlook Perbankan Syariah* tahun 2007, diketahui bahwa di antara kendala percepatan market share (5%) perbankan syariah adalah faktor SDM, baik di sisi minimnya jumlah SDM perbankan syariah maupun dari segi kualitasnya yang masih rendah.

Saat ini, dari seluruh SDM yang bekerja di industri keuangan syariah, tercatat baru 10 persen saja SDM yang memiliki latar belakang ekonomi syariah, sementara yang 90 persen mempunyai latar belakang ilmu ekonomi konvensional, yang dikarbit melalui pelatihan singkat tentang perbankan syariah. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia menunjukkan bahwa dalam 4-5 tahun ke depan diperlukan 10.000 SDM untuk mengisi industri perbankan syariah di Indonesia. Data Bank Indonesia menyebutkan angka yang lebih tinggi lagi, yakni sekitar 14.000.⁷ Untuk itu, Lembaga Pendidikan Tinggi adalah institusi yang paling berkompeten dalam penyediaan SDM yang dibutuhkan oleh industri perbankan syariah ini.

Dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa, saat ini baru sekitar 20-an perguruan tinggi yang mengambil peran ini. Itupun baru sekitar 1.000 orang yang berhasil diluluskan setiap tahunnya. Dalam jangka menengah antara 5-10 tahun mendatang diperlukan sebanyak 38.940 lulusan D3 dan Doktor bidang ekonomi Islam. Sementara dalam jangka panjang antara 10-30 tahun yang akan datang, SDM yang diperlukan adalah 125.790 orang dari lulusan D3 hingga doktor. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan doktor, minimal 10 perguruan tinggi harus membuka program doktor ilmu ekonomi Islam.⁸

SDM industri keuangan syariah yang ada sekarang belum cukup dan belum sesuai harapan, baru sebatas SDM pragmatis yang hanya mampu bekerja, dan belum mampu mengubah masalah yang ada di industri perbankan

7 Anonymous, "Menggodok Kurikulum-Menyiapkan SDM Andal", Jakarta, Majalah Sharing, Edisi April 2009.

8 Ibid, hal. 21

ke kondisi yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengelola lembaga keuangan syariah ke depan harus disiapkan sejak dini, sehingga mereka mampu memahami paradigma syariah sekaligus memiliki keahlian profesional.

Data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia di bawah ini menjelaskan bahwa masih terjadi kesenjangan antara Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dan Perguruan Tinggi Umum (PTU) dalam melakukan pembelajaran ekonomi Islam, sehingga lulusan yang masuk ke industri keuangan syariah masih didominasi oleh mereka yang berlatar belakang konvensional.

Tabel Latar Belakang Pendidikan Para Pegawai Bank Syariah

Tahun	SLTA	D3	S1 Ekonomi	S1 Hukum	S1 Fisip	S1 Pertanian	S1 Teknik	S1 Syariah	S2
2009	6,2%	18,7%	38,0%	6,2%	5,2%	4,9%	7,6%	9,1%	4,1%
2008	5,3%	12,1%	39,1%	7,2%	6,8%	6,3%	9,2%	8,6%	5,3%

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2010.

Dalam situasi ini, sebagai lembaga ilmu pengetahuan yang independen, perguruan tinggi baik PTAI maupun PTU yang sudah memiliki konsentrasi atau program studi ekonomi Islam adalah institusi paling berkompeten dalam penyediaan SDM yang dibutuhkan oleh industri perbankan syariah. Melalui kegiatan pembelajaran dan penelitian, lembaga pendidikan tinggi dapat menyumbangkan gagasan-gagasan mengenai derivasi dan penyesuaian peraturan-peraturan teknis yang dapat menstimulasi kualitas kompetitif pada bank-bank syariah nasional, sekaligus dapat memberikan edukasi pada masyarakat dalam rangka akselerasi perbankan syariah di Indonesia.

Yang menjadi pokok permasalahan saat ini adalah perkembangan ekonomi Islam di Indonesia yang memerlukan banyaknya SDM di satu pihak, sementara di pihak lain perguruan tinggi saat ini telah banyak mengembangkan pendidikan ekonomi Islam baik dalam bentuk mata kuliah, konsentrasi maupun program studi. Perguruan tinggi tersebut terbagi menjadi dua kelompok, perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (PTAI), dan perguruan tinggi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional (PTU). Karakteristik dan keunggulan

masing-masing dalam menghasilkan profil lulusan berbeda, terutama pada bangunan kurikulum dan substansi pembelajaran.⁹

Pola Pendidikan Ekonomi Islam di PTAI dan PTU

1. Model Kurikulum Pendidikan Ekonomi Islam di PTAI

Dari sisi kelembagaan, Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) menunjukkan dua trend kelembagaan pendidikan ekonomi Islam. *Pertama*, pembentukan jurusan/program studi/konsentrasi yang mengusung secara spesifik nomenklatur ekonomi Islam atau ekonomi syariah. *Kedua*, pembentukan perguruan tinggi yang mengkhususkan diri pada studi ekonomi Islam atau ekonomi syariah.

Pada trend pertama, selain adanya perbedaan nomenklatur jurusan/program studi/konsentrasi, terdapat pula variasi nomenklatur fakultas yang menaungi jurusan/program studi/konsentrasi tersebut. Dalam hal ini terdapat tiga nomenklatur fakultas, yaitu; 1. Fakultas Syariah, 2. Fakultas Syariah dan Hukum atau Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 3. Fakultas Ekonomi atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Di PTAI yang menggunakan nomenklatur Fakultas Syariah, pendidikan ekonomi Islam diselenggarakan oleh jurusan/program studi/konsentrasi yang nomenklaturnya saling berbeda antara satu dengan yang lain. Dalam hal ini terdapat beberapa varian nomenklatur, yaitu;

- a. Muamalat
- b. Muamalat (Ekonomi Islam)
- c. Muamalat (Hukum Ekonomi Islam)
- d. Ekonomi Islam
- e. Ekonomi Syariah
- f. Keuangan Islam
- g. Manajemen Keuangan Syariah
- h. Hukum Bisnis Syariah
- i. Muamalah Ekonomi dan Perbankan Islam.

⁹ Dr. Euis Amalia, M. Ag. dkk, *op. cit.*, hal. 6

Di PTAI yang menggunakan nomenklatur Fakultas Syariah dan Hukum, terdapat beberapa varian nomenklatur, di antaranya;

- a. Muamalah (Ekonomi Islam)
- b. Muamalat (Hukum Ekonomi Islam)
- c. Ekonomi Islam

Di PTAI yang menggunakan nomenklatur Fakultas Ekonomi, ada beberapa varian nomenklatur, yaitu;

- a. Keuangan Islam
- b. Perbankan Syariah

Pada trend kedua, pembentukan perguruan tinggi/sekolah tinggi yang mengkhususkan diri pada studi ekonomi Islam/ekonomi syariah, pendidikan ekonomi Islam diselenggarakan oleh jurusan/program studi/konsentrasi. Model kedua ini antara lain dapat dilihat pada Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia, STEI SEBI, dan STEI Yogyakarta.

Dari segi jumlah beban SKS pada kurikulum pendidikan ekonomi Islam, terdapat variasi di antara PTAI. Di Fakultas dengan nomenklatur Fakultas Syariah ada kecenderungan total beban SKS berkisar 146-156 SKS. Sedangkan di fakultas dengan nomenklatur Fakultas Syariah dan Hukum, terdapat kecenderungan jumlah beban SKS antara 152-157 SKS. Sementara di fakultas dengan nomenklatur Fakultas Ekonomi atau Ekonomi dan Bisnis, total beban SKS mencapai 145-157 SKS.¹⁰

Standar Kurikulum Ekonomi Islam

Perkembangan bisnis Islami yang sangat cepat saat ini membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan berkualitas yang mampu memenuhi kebutuhan pelaku bisnis atau usaha. Sampai saat ini, kebutuhan akan SDM Islami tersebut belum terpenuhi dan belum diimbangi dengan supply yang memadai.

Pada tataran teoritis dan konseptual, kita masih merasakan kekurangan pakar ilmu ekonomi Islam yang sekaligus mendalami ilmu Fiqh dan Ushul

¹⁰ *ibid*, hal. 94

Fiqh, Fiqh Muamalah dls. Untuk menghasilkan sumber daya insani yang berkualitas dan profesional, peran perguruan tinggi menjadi sangat penting di sini. Perguruan tinggi tidak saja dituntut menyiapkan pengembangan kurikulum dan perumusan silabi yang tepat guna dan sasaran, tetapi juga dituntut untuk mampu menghasilkan output lulusan yang memiliki basis kompetensi yang baik dan bermutu serta dibutuhkan pasar.

Dengan adanya perubahan yang serba cepat dalam bisnis Islam, yang merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam itu sendiri, sudah sepatutnya perguruan tinggi harus mempersiapkan output lulusan yang mampu menjawab tantangan ini. Lulusan perguruan tinggi harus memiliki kualitas yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri keuangan Islam saat ini.¹¹

Langkah yang dilakukan beberapa perguruan tinggi tersebut tentu saja merupakan hal yang sangat positif di tengah ketiadaan upaya yang sistematis dari pemerintah. Khususnya yang menangani pendidikan tinggi, baik Diknas maupun Kemenag. Namun upaya pengembangan program studi atau konsentrasi ekonomi Islam secara terpisah masing-masing oleh seluruh perguruan tinggi tersebut, menimbulkan perbedaan kurikulum antar satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lainnya untuk program studi yang sama.

Penyusunan kurikulum ekonomi Islam oleh masing-masing perguruan tinggi secara sendiri-sendiri, didasarkan karena latar belakang akademik para pengajarannya yang berbeda-beda, dan mengabaikan kebutuhan pasar, dan lebih celakanya kurikulum tersebut disusun oleh bukan ahlinya. Dampak negatifnya dirasakan oleh lulusan dengan standar kompetensi yang tidak setara dan tidak berorientasi kepada kompetensi, mutu dan kebutuhan pasar, dan jelas di sini yang dirugikan adalah lulusan sebagai pencari kerja.

Dengan demikian, kesetaraan, kesamaan kurikulum dan silabus program studi ekonomi Islam mutlak diperlukan, sehingga minimal akan diperoleh adanya standar kompetensi dan mutu lulusan, sehingga akan mempermudah bagi setiap lulusan untuk berkompetisi di dunia kerja. Hal

¹¹ Prof. Dr. Veithzal Rival, MBA, *op. cit.*

ini akan melahirkan bisnis Islam yang bermutu karena dikelola oleh sumber daya manusia yang bermutu yang dilahirkan oleh lembaga pendidikan yang bermutu pula.

Tentu disadari pula bahwa lulusan yang bermutu adalah merupakan hasil dari proses pendidikan yang bermutu, yang diberikan oleh tenaga kependidikan yang bermutu pula.

Permasalahan mendasar penerapan ekonomi Islam di Indonesia

Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh para pakar maupun praktisi ekonomi Islam adalah terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki penguasaan ilmu ekonomi yang berbasis pada syariah Islam. Terbatasnya jumlah SDM yang memenuhi kualifikasi tersebut mendorong berbagai pihak yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap ekonomi Islam untuk mengambil langkah-langkah alternatif sebagai solusinya. Di antara langkah-langkah tersebut adalah membangun institusi pendidikan ekonomi Islam yang berkualitas tinggi. Karena kendala yang dihadapi tidak mudah, maka langkah ini memerlukan kerja keras, perencanaan yang matang, dan strategi yang tepat agar output yang dihasilkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada.¹²

Tingginya permintaan terhadap terhadap SDM ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam semakin dapat diterima oleh masyarakat. Kendatipun harus diakui bahwa ketika berbagai pemikiran dan konsep ekonomi Islam pertama kali diperkenalkan, kemudian diimplementasikan dalam berbagai institusi ekonomi, sementara itu masih ada sebagian dari masyarakat muslim yang ragu dan tidak percaya. Munculnya sikap semacam ini sebagai refleksi dari pemahaman bahwa ajaran Islam hanya mengatur pola hubungan yang bersifat individual antara manusia dengan Tuhan hanya saja, dan tidak mengatur aspek-aspek lain yang berkaitan dengan interaksi dan pola kehidupan antara sesama manusia.

12 Prof. Dr. Dawam Rahardjo, "Konsep Arsitektur Ilmu Ekonomi Islam dan Pengembangannya pada Perguruan Tinggi di Indonesia", dalam Workshop Nasional Arsitektur Ilmu Ekonomi Islam, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 28 Februari, 2012.

Berkembangnya wacana ekonomi Islam sebagai sistem alternatif perekonomian yang ada, tidak lepas dari kekeliruan sejumlah premis ekonomi konvensional, terutama dalam masalah rasionalitas dan moralitas. Ilmu ekonomi konvensional sama sekali tidak mempertimbangkan aspek nilai dan moral dalam setiap aktifitas yang dilakukannya. Sehingga tidak mampu menciptakan pemerataan dan kesejahteraan secara lebih adil. Yang terjadi justru kondisi ketimpangan dan kesenjangan yang luar biasa.

Landasan filosofis ekonomi Islam pada dasarnya terletak pada tiga hal yaitu; *Pertama*, inspirasi dan petunjuk pelaksanaan ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga tidak boleh ada satu aktifitas perekonomian pun, baik produksi, distribusi maupun konsumsi yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula berbagai kebijakan dan regulasi yang dibuat, harus sejalan dengan kedua sumber hukum ajaran Islam tadi. *Kedua*, perspektif dan pandangan-pandangan ekonomi Islam mempertimbangkan peradaban Islam sebagai sumber, sehingga kondisi yang terjadi di masa kejayaan peradaban Islam mempengaruhi pembentukan perspektif dan pandangan ekonomi Islam. Selanjutnya dikomparasikan dengan sistem ekonomi konvensional yang ada, dan kemudian diterapkan pada kondisi saat ini. *Ketiga*, bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk menemukan dan menghidupkan kembali nilai-nilai, prioritas, dan etika ekonomi komunitas muslim pada periode awal perkembangan Islam.¹³

Bentuk-bentuk bisnis Islam

Bisnis Islam tidak semata di bidang ekonomi, keuangan dan perbankan saja, akan tetapi lebih luas lagi sehingga kehadiran kurikulum program studi ekonomi Islam diharapkan mampu mengisi semua kebutuhan bisnis, seperti;

- a. Bidang usaha bank dan keuangan:
 1. Bank
 2. Leasing
 3. Asuransi

13 Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam, Surabaya, Risalah Gusti, 1996

4. Dana pensiun
 5. Pegadaian
 6. Anjak piutang
 7. Pasar modal
 8. BMT
 9. Pasar keuangan
 10. Dana reksa
 11. Lembaga keuangan mikro
 12. Lembaga pembiayaan Islami, dan lain-lain
- b. Bidang usaha Non keuangan:
1. Lembaga pendidikan
 2. Konsultan
 3. Rumah sakit
 4. Rumah makan
 5. Yayasan sosial
 6. Koperasi
 7. Notaris
 8. Penasehat hukum
 9. Psikolog
 10. Kontraktor
 11. Perdagangan
 12. Perindustrian
 13. Perkebunan
 14. Kehutanan
 15. Pertanian
 16. Akuntan publik
 17. Hotel dan lain-lain¹⁴

Diakui bahwa dalam banyak kesempatan, ketika berbicara masalah ekonomi Islam lebih banyak menyoroti masalah perbankan saja. Hal inipun tentu tidak salah mengingat demikian kuatnya dukungan Bank Indonesia dalam

upaya mengatasi keterbatasan SDM berbasis ekonomi Islam untuk memenuhi permintaan sektor perbankan yang saat ini tidak kurang dari 40.000 orang. Di satu sisi pertumbuhan dan perkembangan bank syariah sangat pesat, akan tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan SDM yang memadai dan sesuai dengan permintaan pasar, sehingga banyak bank yang menempuh jalan pintas dengan membajak dari bank syariah lainnya ataupun merekrut dari bank konvensional yang notabene tidak memiliki spirit ekonomi Islam.

Potret, Tantangan dan Harapan

- a. Potret dan Tantangan:
 1. Terbatasnya literatur berupa text books tentang ekonomi Islam
 2. Terbatasnya pakar ekonomi dan intelektual baik di perguruan tinggi maupun di sekolah menengah yang memahami ilmu ekonomi Islam
 3. Unemployment Rate yang belum mencapai target
 4. Kesenjangan ekonomi (wealth and income disparity)
 5. Lack of implementation of ethics and moral in economic activities
 6. Lack of knowledge based management
 7. Optimizing natural resources
 8. Optimizing domestic market potential
 9. Adanya standar mutu (modul/materi, pengajar, lembaga pendidikan/training provider, lembaga sertifikasi).
 10. Berbagai jenis bank syariah memunculkan kebutuhan kualifikasi SDM yang beragam
 11. Investor di bidang pendidikan perbankan/keuangan Islam, pengembangan lembaga pendidikan yang ada dan penambahan lembaga pendidikan yang secara khusus memenuhi kebutuhan bisnis Islam
 12. Sosialisasi kepada masyarakat akan pilihan alternatif program pendidikan/karir di bidang bisnis Islam
 13. Terbatasnya pakar ekonomi Islam yang menulis tentang ilmu ekonomi Islam

14. Prof. Dr. Veithzal Rivai, MBA, *op. cit.*

14. Terbatasnya perguruan tinggi yang menawarkan program studi ekonomi/keuangan/perbankan/bisnis Islam pada semua strata S1/S2/S3
15. Perbedaan kurikulum standar yang menggabungkan pembelajaran operational financial/business skill dan Islamic skill
16. Jumlah dosen/pengajar yang kompeten dalam bidang ekonomi/keuangan/perbankan/bisnis Islam masih terbatas
17. Kurangnya pemahaman pakar ekonomi pada nilai-nilai aqidah dan akhlak serta hukum Islam, sehingga keberpihakan dan pengetahuan tentang ekonomi Islam masih terbatas
18. Terbaginya institusi induk dalam sistem pendidikan di Indonesia menjadi Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, sehingga untuk kasus ekonomi Islam masih belum fokus dalam perencanaan dan kolaborasi dengan dunia usaha.

Harapan

1. Terlahir manusia yang beretika, moral yang luhur dan amanah
2. Tercipta good corporate governance
3. Adanya transparansi
4. Terarah kepada real sector development
5. Tahun 2020 pangsa pasar ekonomi Islam mencapai 20%
6. Terbentuk undang-undang dual economic system
7. Bersatunya semua potensi ekonomi Islam dalam satu wadah

Problematika yang dihadapi pencari kerja

- a. Program studi ekonomi Syariah (Kementerian Agama);
 1. Kalah berkompetisi dalam mengikuti seleksi di lingkungan bank
 2. Unggul dari segi Fiqh Muamalat
 3. Belum tersedianya konsentrasi sesuai kebutuhan dunia kerja/bisnis
- b. Program studi ekonomi konvensional;
 1. Unggul dalam muatan keilmuan

2. Sangat lemah dalam muatan bisnis Islam, akan tetapi dengan sedikit upaya masih bisa unggul dalam kompetisi seleksi di lingkungan dunia kerja
- c. Program studi ekonomi Islam (Kementerian Pendidikan Nasional);
 1. Lebih percaya diri dalam berkompetisi
 2. Memiliki kedalaman dalam muatan ilmu ekonomi dan Fiqh Muamalat

Kontroversi seputar kurikulum ekonomi syariah

- a. Program Studi Ekonomi Syariah (Kementerian Agama)
 1. Kurikulum dengan penekanan lebih kepada Fiqh Muamalat
 2. Kedalaman materi yang belum setara dengan program studi ekonomi Islam
 3. Kurikulum lebih bersifat umum dan relatif belum tersedianya konsentrasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja/bisnis
- b. Program Studi Ekonomi Konvensional
 1. Kurikulum tidak mendukung kemajuan ekonomi/bisnis Islam
 2. Kurikulum dan silabus banyak menyesatkan
- c. Program Studi Ekonomi Islam (Kementerian Pendidikan Nasional)
 1. Kurikulum dan silabus dibangun sebagai perpaduan dari program studi ekonomi pembangunan dan program studi manajemen
 2. Kurikulum dan silabus telah dikaji dalam berbagai seminar dan lokakarya.

Langkah Strategis Penguatan Pengembangan Pendidikan Ekonomi Islam di Indonesia

Kendala utama dalam pengembangan bisnis Islam adalah ketersediaan SDM Islami yang handal dan berkualitas, mengingat tenaga terdidik dan berpengalaman di bidang ini relative sangat sedikit. Pengembangan SDM Islami sangat perlu karena keberhasilan pengembangan bisnis ini pada level mikro ditentukan oleh mutu manajemen serta tingkat pengetahuan dan ketrampilan pengelola perusahaan.

a. Tenaga pengajar

Tenaga pengajar merupakan salah satu kunci penting pada perguruan tinggi, sebab tanpa pengajar yang handal maka proses belajar mengajar tidak akan efektif.

b. Kurikulum dan kompetensi inti.

Hingga saat ini belum ada kebijakan di tingkat nasional dalam hal standarisasi kurikulum inti ekonomi Islam tingkat nasional, baik dari Kementerian Agama, maupun Kementerian Pendidikan Nasional.

c. Struktur Akademik Posisi Kajian Ekonomi Islam.

Kondisi kekinian yang terdapat pada pembelajaran ekonomi Islam adalah masalah struktur akademik posisi kajian ekonomi Islam. Sebagian perguruan tinggi telah membuka pendidikan ekonomi Islam dalam bentuk program studi dari jenjang S1 sampai S3, utamanya di perguruan tinggi umum, baru berupa konsentrasi atau bahkan hanya berupa mata kuliah pilihan.

d. Sarana Praktikum, Sistem Informasi dan Akses Referensi

Sarana dan pra sarana pembelajaran yang terdapat di perguruan tinggi agama Islam cukup memadai.

e. Kebijakan Pimpinan dan Kultur Akademik

Pada beberapa perguruan tinggi baik PTAI maupun PTU perkembangan kajian ekonomi Islam sangat didukung oleh pimpinan. Sementara itu kultur akademik pengembangan ekonomi Islam belum berjalan dengan baik, karena terbatasnya penelitian, penulisan buku, karya ilmiah dan lain sebagainya.

Tawaran solusi

1. Single kurikulum untuk program studi ekonomi Islam (Kementerian

Pendidikan Nasional)

- a. Cukup satu kurikulum dan silabus untuk program studi ekonomi Islam
- b. Membuka berbagai konsentrasi sesuai dengan permintaan pasar, seperti;
 - Perbankan Islam
 - Keuangan dan investasi Islam
 - Islamic Human Capital
 - Pemasaran Islami
 - Risiko bisnis Islami
 - Jasa-jasa Islami dan lain-lain.
- c. Khusus untuk mahasiswa S1 atau S2 diberikan peluang memilih jalur penyelesaian tugas akhir (skripsi/tesis, bisnis plan, dan lain sebagainya)
2. Kurikulum program studi ekonomi syariah (Kementerian Agama)
 - a. Penekanan kurikulum yang lebih spesifik
 - b. Kurikulum dibuat lebih spesifik dengan konsetrasi yang spesifik pula untuk memenuhi permintaan pasar.
3. Pembukaan program studi baru di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional sudah merupakan langkah yang baru, akan tetapi masih sangat kental dengan sistem birokrasi yang sulit di tembus
4. Perlu diberlakukan dengan kebijakan khusus untuk mempercepat pendirian program studi yang baru
5. Perlu keadilan dalam pemberian kemudahan membuka kelas pararel sebagaimana yang telah dinikmati oleh beberapa perguruan tinggi negeri
6. Memperbanyak riset dan penelitian tentang ekonomi Islam
7. Mengembangkan networking yang lebih luas dengan berbagai institusi pendidikan ekonomi Islam lainnya, lembaga keuangan dan non-keuangan
8. Perlu motivasi untuk akademisi dan praktisi dalam menulis buku teks dengan subsidi khusus.

Kesimpulan

- Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, di antaranya;
1. Perguruan tinggi di Indonesia mempunyai potensi yang besar dalam mempersiapkan SDM integrative, yaitu memiliki kompetensi yang memadai dari aspek syariah sekaligus mumpuni dalam bidang ekonomi dan keuangan, baik dari segi konsep dan operasional. Hanya saja saat ini fakta menunjukkan bahwa masih terjadi keragaman struktur akademik yaitu posisi bidang kajian ekonomi Islam.
 2. Kalangan perguruan tinggi memiliki kekenderungan persepsi tersendiri tentang pembelajaran ekonomi Islam. Mereka pada umumnya menyetujui bahwa proses penyusunan kurikulum perlu dilakukan melalui suatu mekanisme *workshop* dengan mendatangkan para pembaca ahli dan kalangan *stakeholder*.
 3. Pembelajaran ideal di masa datang yang dapat ditawarkan adalah pengembangan sistem pendidikan ekonomi Islam integrative, muatan kurikulum perlu penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris, penguasaan ilmu-ilmu dasar syariah, penguasaan ilmu ekonomi Islam, penguasaan metodologi penelitian baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif.
 4. Beberapa langkah strategis yang harus disusun dalam usaha pengembangan ekonomi Islam adalah;
 - a. Mendorong perguruan tinggi untuk segera membuka program studi ekonomi Islam secara tersendiri
 - b. Memperbanyak riset, studi, dan penelitian tentang ekonomi Islam
 - c. Mendorong penulisan kajian dan karya ilmiah
 - d. Memberikan fasilitas kepada tenaga pengajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
 - e. Secara rutin mengirim para staf pengajar untuk mengikuti pelatihan, workshop, seminar maupun pendidikan terkait ilmu ekonomi Islam
 - f. Perlu standarisasi kurikulum ekonomi Islam di tingkat nasional
 - g. Peningkatan sarana pembelajaran dan laboratorium praktik, dan

mewajibkan job training kepada mahasiswa

- h. Sosialisasi dan edukasi ekonomi syariah kepada komunitas masyarakat yang lebih luas.
- i. Mengembangkan networking yang lebih luas dengan berbagai institusi pendidikan ekonomi Islam.

Daftar Pustaka

- Amalia, Euis, M. Ag, dkk, *Potret Pendidikan Ekonomi Islam di Indonesia, Analisis Kurikulum, Model Pembelajaran, Dan Hubungannya dengan Kompetensi SDM pada Industri Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta, Gramata Publishing, 2012
- An-Nabhan, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 1996
- Anonymous, "Menggodok Kurikulum-Menyiapkan SDM Andal", Jakarta, Majalah Sharing, Edisi April 2009
- Arifin, Zainul, *Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta, Pustaka Alvabet, 2000
- As-Shadr, Muhammad Baqir, *Iqtishaduna*, Daar al-Kitab al-Islamy, tanpa tahun.
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terjemahan Ikhwan Abidin, Jakarta, Gema Insani Press, 2000
- Chapra, M. Umer, *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, Jakarta, SEBI, 2001
- Choudury, Mausudul Alam, *Contributions To Islamic Economic Theory*, New York; St Martin's Press, 1988
- Fauzi, Yuslam, "Perkembangan, Peluang, dan Tantangan Perbankan Syariah di Indonesia" dalam seminar Ada apa dengan RUU Perbankan Syariah, Jakarta, LPEB-PKB, 19 November 2005
- Haneef, Mohamed Asalam, *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis*, Kuala Lumpur; S. Abdul Majeed &

Co, 1995

Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1995

M. M. Metwally, *Essays on Islamic Economic*, Calcutta, Academic Publisher, 1993

M. M. Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Jakarta, Bangkit Daya Insana, 1995

Mannan, M. Abdul, *Islamic Economic; Theory and Practice*, Delhi, Sh. M. Ashraf, 1970

Naqvi, Syed Nawab Heidar, *Etika dan Ilmu Ekonomi, Suatu Sintesis Islami*, Bandung, Mizan, 1985

Rahardjo, Dawam, "Konsep Arsitektur Ilmu Ekonomi Islam dan Pengembangannya pada Perguruan Tinggi di Indonesia", dalam Workshop Nasional Arsitektur Ilmu Ekonomi Islam, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 28 Februari, 2012

Rahardjo, Dawam, *Islam dan Transformasi Sistem Ekonomi*, Jakarta: LSAF, 2006

Rivai, Veithzal, MBA, *Kerangka Pengembangan Kurikulum Ekonomi Islam dan Keuangan Islam di Indonesia*, paper disampaikan dalam Workshop Nasional "Arsitektur Ilmu Ekonomi Islam", di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 28 Februari 2012

Siddiqi, Muhamad N, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*, Jeddah and The Islamic Foundation, 1981

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Ekonisiam 2003

Tim IDB, *Annual Report IDB 2009*, Jeddah: IDB, 2009

Tim P3EI UII dan BI, *Ekonomi Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008